

Analisis Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Lia Fitrianingrum

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat
e-mail: liatejo@gmail.com

Abstrak

Kebijakan penanganan covid 19 di Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat telah diawali dari bulan Maret tahun lalu, sejak dinyatakan sebagai bencana pandemi nasional dan terjadi kluster penyebaran covid 19 di Jawa Barat. Implementasi kebijakan dilakukan dengan berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Jawa Barat. Dinamika kebijakan yang diwujudkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat itu yang tujuannya untuk menekan laju penambahan covid 19. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, wawancara dan pengamatan. Fokus kajian ini pada analisis implementasi kebijakan penanganan covid 19 yang menggunakan model pendekatan proses politik dan administrasi. Isi kebijakan di analisa dengan pendekatan konten dan konteks kebijakan dalam proses implementasi kebijakan. Temuan dari kajian ini bahwa implementasi kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat melibatkan pembuat dan pelaksana kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan model pentahelik dalam penanganan covid 19 dengan melibatkan jejaring yang dimiliki dengan tujuan kemanfaatan bagi masyarakat terdampak, dan strategi pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan covid 19 menumbuhkan sikap gotong royong antar warga masyarakat untuk menghasilkan penurunan laju perkembangan covid 19.

Kata kunci: implementasi kebijakan, penanganan covid, pemerintah propinsi jawa barat

Analysis Of Covid-19 Handling Policy Implementation By West Java Provincial Government

Abstract

Covid-19 handling policy in West Java Provincial Government has been started from March last year, since it was declared a national pandemic disaster and overthere was a cluster of covid-19 spread in West Java. Policy implementation is carried out in intensive coordination with the Central Government and Regency/City Governments in West Java. The policy dynamics executed by West Java Provincial Government was adjusted to the conditions and needs at that time with the aim of suppressing the covid-19 addition rate. The research method used in this study is a qualitative research method carried out by collecting secondary data, interioews and observations . Research fokus is on analyzing the implementation of COVID-19 handling policy using political and administrative process approach model. Policy content is analyzed using the content approach and policy context in policy implementation process. The research finding is implementation of the covid 19 handling policy in West Java involved policy makers and implementers, the West Java Provincial Government used pentahelic model in handling covid 19 by mobilizing all available resources with the aim of benefiting the affected community,

and the West Java Provincial government strategy in handling covid 19 fostered an attitude of mutual cooperation between citizens to decrease covid 19 rate.

Keywords: policy implementation, covid handling, west java provincial government

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid 19 membawa pengaruh terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat seperti dari segi ekonomi, politik, pertahanan, keamanan dan sosial budaya, terbatasnya pergerakan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat. (Hawryluck, 2004). Pandemi Covid 19 juga memiliki akibat terbatasnya ruang gerak masyarakat, barang dan jasa. Pembatasan perjalanan dan pergerakan merupakan salah satu solusi untuk mengurangi pertumbuhan virus Covid-19 (Upton, 2020).

Kebijakan yang diterapkan oleh negara-negara di seluruh dunia guna mengurangi laju pertumbuhan Covid 19 adalah dengan menerapkan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, pembatasan bepergian keluar negeri menggunakan pesawat udara dan penangguhan sementara mobilitas sektor korporasi. (Nikola, Angela, & Emily, 2020). Pemerintah Daerah memberlakukan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat yang merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat apabila situasi dan kondisi perekonomian daerah menurun (Arif, 2020). Perkembangan kasus covid 19 di level dunia dan Nasional termasuk di dalamnya Propinsi Jawa yang memiliki jumlah penduduk 20% penduduk Indonesia. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah kasus aktif tingkat Provinsi maka posisi Provinsi Jawa Barat menduduki posisi kedua kasus tertinggi setelah Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus 16.724

Kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat sudah diawali sejak bulan Maret 2020 dengan mulai diberlakukan bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Pada Bulan April 2020 mulai diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bogor Depok, Bekasi (Bodebek), kemudian di Bandung Raya, dan selanjutnya kebijakan PSBB diberlakukan serentak di Jawa Barat mulai 6 Mei 2020. Perpanjangan PSBB Bodebek dilakukan secara bertahap sampai dengan 20 Januari 2021. Perkembangan kebijakan PSBB diubah menjadi kebijakan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM 1), yang diperkuat oleh SE. Gubernur Jawa Barat Nomor

72/KS.13/hukham tertanggal 8 januari 2021 tentang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat di Propinsi Jawa Barat. Terdapat 20 kabupaten Kota yang harus melakukan PPKM sesuai Imendagri No 1 Tahun 2001 diantaranya kabupaten Sukabumi, kabupaten Sumedang, kabupaten Garut, Kota Depok, kabupaten Karawang, kota Tasikmalaya, Kabupaten kuningan, kota Banjar, kabupaten Ciamis, Kota Bandung, kota Bogor, kota Cimahi dsb.

Kebijakan PPKM 1 di Propinsi Jawa Barat juga didukung oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.10-Hukham/2021 Tentang Pemberlakuan PSBB Proporsional di 20 (duapuluh) Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.TI-Hukham/2021 tentang pemberlakuan Adaptasi kebiasaan Baru di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Barat. Kebijakan PPKM 1 berakhir kemudian dilanjutkan dengan PPKM 2, di Propinsi Jawa Barat PPKM 2 dilaksanakan serentak di 27 Kabupaten/Kota periode tanggal 26 Januari-8 Februari 2021. Kebijakan PPKM 2 di Jawa Barat dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 15/KS.01/Hukham tentang perpanjangan pelaksanaan pembatasan kegiatan Masyarakat dalam Penanganan Covid 19 di propinsi Jawa Barat.

Pada hari raya umat Islam tahun lalu dan tahun 2021, kebijakan yang dilakukan Propinsi Jawa Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur No. 451/64/Yanbangsos tentang penyelenggaraan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Pasca Idul Fitri walaupun sudah dilakukan pengawasan ketat terhadap keramaian dan arus mudik dan balik tetapi kasus covid 19 melonjak tepatnya pada pertengahan bulan Juni tahun 2021 tepatnya pasca lebaran Idul Fitri. Kebijakan dalam rangka penanganan covid 19 terus diimplementasikan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

Beberapa penelitian terkait kebijakan penanganan covid 19 yaitu mengenai kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

COVID-19 (Tuwu, 2020), Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci (Imam, 2020), relasi hubungan antar daerah dan Pemerintah pusat dalam penanganan covid 19 (Katharina, 2020) upaya preventif dalam penanganan penyebaran Covid 19 dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat (Rohim & Rezk, 2020).

Kajian tentang kebijakan khususnya dalam pelaksanaan penanganan covid 19 dengan lokus di Propinsi Jawa Barat menjadi hal baru untuk dapat memperkaya kajian kebijakan. Letak kebaruan dari kajian ini dengan menganalisa antara konsep implementasi kebijakan dengan melihat aspek konten dan

konteknya dalam penanganan covid 19 di pemerintah Propinsi Jawa Barat.

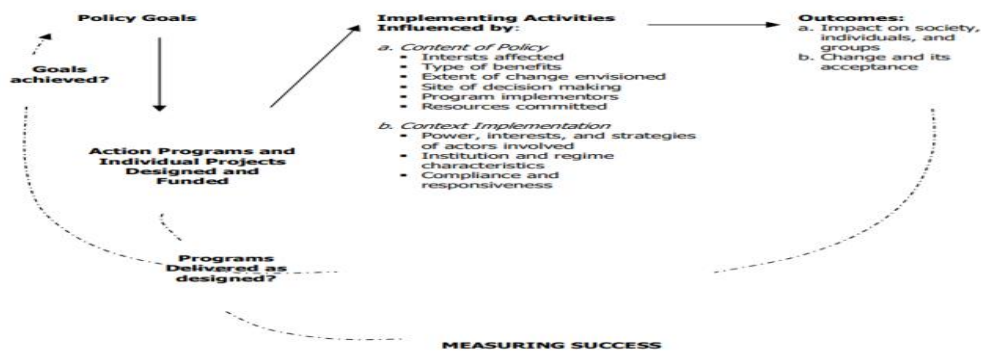
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang diajukan dalam kajian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan penanganan covid 19 di Propinsi Jawa Barat.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan dalam pelaksanaan penanganan covid 19 di Propinsi Jawa Barat baik dari aspek konten dan konteksnya.

B. PEMBAHASAN

Dua variable besar mempengaruhi keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle, yaitu konten kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) seperti gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Implementasi sebagai proses Politik dan Administrasi



Sumber . (Grindle, 1980)

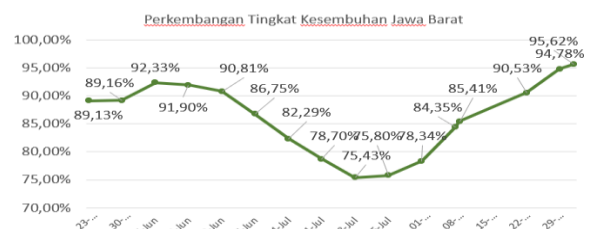
Penanganan Covid 19 di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dianalisa menggunakan Teori Grindle.

Konten kebijakan yang disebutkan dalam teori Grindle meliputi: 1) kebijakan yang mempengaruhi kepentingan , 2) Berbagai manfaat yang dicapai, 3) tingkat perubahan yang ingin dicapai, 4) Posisi pembuat kebijakan, 5) pelaksana program 6) Sumber daya yang diberdayakan. Konteks kebijakan mempengaruhi proses implementasi 1) Kedudukan, kepentingan dan strategi aktor, 2) Karakteristik/kekhususan lembaga dan penguasa, 3) tingkat kepatuhan serta respon pelaksana.

1. Kebijakan yang mempengaruhi kepentingan
Dalam penanganan covid 19, maka seluruh implementasi kebijakan terkait Covid 19 adalah untuk kepentingan

dan keselamatan masyarakat Jawa Barat, hal ini terlihat pada pada angka kesembuhan berada di 95,62% (gambar 1) dan trennya selalu meningkat.

Gambar 2 Perkembangan Tingkat Kesembuhan Kasus Covid-19 di Jabar



Sumber New All Record, Bersatu Lawan Covid-19, <https://data.covid19.go.id/>, Diolah

2. Berbagai manfaat yang dicapai

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi Era Society 5.0

- Manfaat yang dicapai dari implementasi penanganan Covid 19 yakni tersedianya layanan satu pintu untuk masyarakat yang terintegrasi dalam aplikasi pikobar yang merupakan layanan unggulan di pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, banyak sekali masyarakat Jawa Barat yang telah memanfaatkan aplikasi tersebut untuk konsultasi online maupun dalam permintaan obat gratis bagi pasien isoman. Di Jawa Barat juga terdapat Surplus Ketersediaan Oxygen Untuk kebutuhan kritis Sebanyak 263,6 Ton/Hari. Tersedianya layanan vaksinasi masal di beberapa tempat perbelanjaan seperti BEC Mall, Cibinong City Mall, Resinda Park Mall, CSB Mall, dengan realisasi total 1.376 Karyawan dan Pengunjung Mall. Vaksinasi masal dan pembukaan sentra-sentra vaksinasi dilakukan di banyak tempat di Jawa Barat bekerjasama dengan pihak swasta, pengusaha, pemerintah daerah kabupaten kota, akademisi dan komunitas untuk mencapai kekebalan kelompok di akhir tahun 2021, mengingat penanganan covid 19 merupakan kerja bersama semua pihak
- 3. Tingkat perubahan yang ingin dicapai Tingkat perubahan yang ingin dicapai pada pelaksanaan kebijakan penanganan covid 19 adalah penurunan level zona resiko per kabupaten kota di Jawa Barat sesuai Inmendagri No. 38 tahun 2021 seperti gambar 3 berikut ini:

Gambar 3 kriteria level kota/kabupaten pada Provinsi Jawa Barat

KRITERIA	INIMENDAGRI NOMOR 38 TAHUN 2021
Level 2	1. Kab. Kuningan 2. Kab. Sukabumi 3. Kab. Pangandaran 4. Kab. Purwokerto 5. Kab. Majalengka 6. Kab. Karawang 7. Kab. Indramayu 8. Kab. Ciamis 9. Kab. Cianjur 10. Kab. Subang 11. Kab. Garut
Level 3	1. Kota Sukabumi 2. Kota Cirebon 3. Kota Bogor 4. Kota Bekasi 5. Kota Bandung 6. Kota Tasikmalaya 7. Kota Depok 8. Kota Cimahi 9. Kota Banjar 10. Kab. Tasikmalaya 11. Kab. Cirebon 12. Kab. Bogor 13. Kab. Bekasi 14. Kab. Bandung 15. Kab. Bandung Barat 16. Kab. Sumedang

Sumber: Komite Penanggulangan Covid 19 Pemda Provinsi Jawa Barat, akses 7 September 2021

Dari gambar 3 di atas terlihat bahwa Kota dan Kabupaten berada di zona resiko level 2 dan level 3. Pembelajaran tatap muka mulai dapat dilakukan secara terbatas dengan kapasitas 50%, 62 % - 100 % untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, MALB dan 33 % untuk PAUD. Industri yang bergerak di bidang ekspor dan domestik dan telah memiliki pertimbangan dari Kementerian Perindustrian untuk dapat beroperasi dengan kapasitas 100% dengan model bekerja dalam sistem pembagian dalam 2 shift serta wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi, karyawan telah divaksinasi dosis 1 sebanyak 50% dan seluruh perusahaan wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

- 4. Kedudukan/posisi pembuat kebijakan Pola topdown dan pola bottom up merupakan dua pola dalam tahap implementasi/pelaksanaan kebijakan (Sabatier, 1986). Kedudukan pembuat kebijakan penanganan covid 19 di Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat dengan model kebijakan yang *top down* dengan koordinasi bersama antar Pemerintah Kabupaten/kota dan dengan Pemerintah Pusat. Upaya transfer informasi dari pemerintah pusat ke daerah adanya dorongan paksaan (Goggin, 1990) dengan pemberlakuan PPKM darurat.
- 5. Pelaksana kebijakan Pelaksana kebijakan penanganan covid 19 menggunakan model pentahelik dengan melibatkan media, bisnis, komunitas, akademisi, pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota. Pelaksana kebijakan penanganan covid 19 selain menggunakan model pentahelik tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembatasan aktivitas, dan sikap kegotongroyongan warga masyarakat dalam membantu sesama masyarakat.

6. Sumber daya yang diberdayakan
Pemberdayaan sumber daya yang dimiliki secara kelembagaan organisasi melalui pembuatan regulasi dalam rangka penanganan covid 19 disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan Covid 19 di Jawa Barat dan pembentukan satgas covid 19, komite penanganan dan pemulihan ekonomi Jawa Barat. Pemerintah Propinsi Jawa Barat juga membuat satgas posko oksigen untuk menangani krisis oksigen di Jawa Barat. Selain organisasi maka faktor lain adalah lingkungan (Quade, 1984). Lingkungan internal dengan pelibatan ASN dengan ASN berbagi dalam membantu masyarakat terdampak juga merupakan salah satu program Pemerintah Daerah propinsi Jawa Barat. Pelibatan seluruh Perangkat Daerah juga menjadi poin penting dalam penanganan covid 19. Lingkungan ekseternal dikembangkan dengan model pentaheliks

Selain terkait isi kebijakan juga terkait konteks kebijakan dalam proses implementasi kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat

- a. Kepentingan, kedudukan dan skema aktor
Kepentingan, kedudukan dan skema penanganan covid 19 di Jawa Barat menggunakan model pentaheliks dengan pelibatan aktor akademisi, media, bisnis, komunitas, Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota serta Pemerintah Pusat sesuai perannya masing-masing, mengingat penanganan covid merupakan kerja bersama dengan pelibatan jejaring antar aktor . Dalam kebijakan penanganan covid 19 Pemda Provinsi Jawa Barat melakukan refocusing anggaran dengan meminta persetujuan DPRD untuk mengalihkan proyek infrastruktur strategis menjadi untuk penanganan covid 19.
- b. Kekhususan elemen badan /instansi dan pemerintah

Kekhususan elemen badan /instansi dan pemerintah sebagai penguasa pada implementasi kebijakan penanganan covid 19 dilakukan dengan model vertikal dimana model koordinasi Pemerintah berada di atas sebagai pembuat kebijakan sementara masyarakat berada di bawah (*bottom*) sebagai pelaksana kebijakan.

- c. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana.

Pendekatan kepatuhan terletak pada tingkat kepatuhan masyarakat (bawahan) terhadap pemerintah (atasan) (Ripley, 1986).

Tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi penanganan covid 19 di Jawa Barat selain karena model pentaheliks dalam penanganan covid 19. Dari sisi kelembagaan satgas covid baik ditingkat pemerintah Propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota dengan tugas fungsi masing-masing semakin mendorong keberhasilan penanganan covid 19 serta pelibatan semua OPD di Jawa Barat.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Unsur konten dan konteks dalam kebijakan penanganan covid 19 di Jawa Barat menjadi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan dengan model pentaheliks, tidak ada yang saling mendominasi untuk menghasilkan penurunan laju perkembangan covid 19 dan bahkan menumbuhkan sikap gotong royong antar warga masyarakat di Jawa Barat.

Rekomendasi kebijakan

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu membuat forum yang memadukan organisasi perangkat daerah terkait, organisasi pengusaha, UKM, BUMD untuk mencari jalan keluar permasalahan agar para pelaku dunia usaha dapat menjalankan usahanya dengan berbasis digital dan inovatif dalam berusaha.
2. Diperlukan program stimulus berupa insentif dengan dukungan anggaran berbasis program padat karya sehingga

dapat tumbuh sektor riil dapat tumbuh dan daya beli masyarakat dapat meningkat.

REFERENSI

- Arif, H. (2020). *Terungkap Alasan Jokowi Pilih PSBB Bukan Lockdown*. CNBC Indonesia:
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200423075855-4-153804/terungkap-alasan-jokowi-pilih-psbb-bukan-lockdown>.
- Goggin. (1990). *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*. USA: Foresmann and company.
- Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: University Press.
- Hawryluck. (2004). SARS Control and Psychological Effects of Quarantine. *in Emerg Infect Dis, vol 11*, 206-1212.
- Imam, i. (2020). Pengaruh Implementasi kebijakan terhadap efektivitas Penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintah Daerah kabupaten Kerinci. *Jurnal ilmu Pengetahuan Sosial Nusantara vol 7 No.2*, 408-420.
- Katharina, R. (2020). Relasi hubungan pusat dan daerah dalam penanganan covid 19. *KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS, Vol. XII, No.5/1/Puslit/Maret/2020*, 25-30.
- Laporan Komite penanganan covid 19 Pemda Provinsi Jawa Barat
- Nikola, Angela, & Emily. (2020). Impacts of COVID-19 on Mobility, Preliminary Analysis of Regional Trends Urban Mobility. *in Slocat*, 3.
- New All Record, Bersatu Lawan Covid-19, <https://data.covid19.go.id/>
- Quade. (1984). *Analysis For Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publishers.
- Ripley. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition*. Chicago illionis: the dorsey press.
- Rohim, N., & Rezk, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i Vol. 7 No. 3*, 227-237.
- Sabatier. (1986). Top down and Botoom up Approaches to implementation Research. *Journal of Public Policy* , 21-48.
- Tuwu, D. (2020). kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. *Journal Publicuho, Volume 3 Number 2 (May-July)*, 267 -278.
- Upton. (2020). Pandemics Are the Dark Side of Global Mobility. *in Nautilus Issue no 84*.